

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa Kesimpulan:

1. Setiap tahun Balai Desa Krawang Sari telah melakukan Digitalisasi administrasi terkait data SPPT PBB yang ketika diterbitkan terdapat SPPT yang ganda, pemerintah desa melaporkan kasus ini ke kantor pajak daerah (Bapenda atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah). Kemudian Meminta klarifikasi apakah SPPT lama masih berlaku atau sudah tidak sah. Jika terjadi perubahan NOP, meminta konfirmasi SPPT mana yang harus digunakan. Setelah itu mengajukan permohonan pembatalan SPPT yang tidak valid agar tidak ada duplikasi yang dilakukan secara kolektif. Proses ini dilakukan setiap tahun hingga pada saat penerbitan SPPT tidak ada lagi kendala seperti sppt yang ganda maupun yang tidak ada objeknya.
2. Saat Ini Balai Desa Krawang Sari telah melakukan verifikasi lapangan secara berkala. Aparatur desa krawang sari yaitu Sekertaris Desa, Kadus dan Rt Mengunjungi langsung lokasi objek pajak untuk mencocokkan data dalam dokumen SPPT dengan kondisi di lapangan. Melakukan wawancara dengan pemilik atau warga sekitar untuk mendapatkan informasi tambahan. Mengukur ulang luas tanah atau bangunan jika ada indikasi perbedaan dengan data yang tercatat.
3. Di Balai Desa Krawang Sari sudah melakukan sosialisasi pajak melalui musyawarah dan pertemuan dengan kadus-kadus setiap dusun yang ada di

Desa Krawang Sari, yang nantinya kadus akan menyampaikan kepada setiap ketua Rt di dusun masing-masing, setelah itu barulah Ketua Rt menyampaikan kepada warganya untuk sosialisasi terkait kewajiban membayar Pajak PBB.

5.2 Saran

Dari Kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk Balai Desa Krawang Sari diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Bapenda untuk meningkatkan sistem digitalisasi agar lebih akurat dan efisien dalam mendeteksi SPPT ganda sebelum diterbitkan.
2. Menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) atau aplikasi berbasis digital untuk memetakan objek pajak secara lebih akurat. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemilik lahan dalam proses verifikasi agar data lebih valid dan mengurangi potensi sengketa.
3. Mengadakan program insentif atau penghargaan bagi warga yang taat membayar pajak, seperti memberikan sertifikat penghargaan atau apresiasi pada pertemuan desa.